



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110
Telepon (021) 3450038 Pst. 2253 021-3842021/3522738,
website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOMOR : 740 TAHUN 2018**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEMESTER I TAHUN 2018**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai ketentuan pasal 4 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Daftar Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri Semester I tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini
- KEDUA : Melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini, maka seluruh Informasi dan Dokumentasi Publik yang terkandung dalam surat keputusan ini dinyatakan sebagai Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEPALA PUSAT PENERANGAN
Selaku PPID Utama
Kementerian Dalam Negeri**



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal, Kepala/Ketua Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENERANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEMESTER I TAHUN 2018**

Nomor : 740 Tahun 2018
Tanggal : 26 Juli 2018

No.	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG DISEDIAKAN	JANGKA WAKTU/RETENSI ARSIP
1.	Permendagri No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 17 Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
2.	Permendagri No 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 17 Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
3.	Permendagri No 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 17 Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
4.	Permendagri No 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 25 Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
5.	Permendagri No 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 22 Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.

6.	Permendagri No 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 13 Februari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
7.	Permendagri No 7 Tahun 2018 Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 04 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
8.	Permendagri No 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 04 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
9.	Permendagri No 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 04 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
10.	Permendagri No 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 04 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.

11.	Permendagri No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 04 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
12.	Permendagri No 12 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa Dengan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 04 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
13.	Permendagri No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 04 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
14.	Permendagri No 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 02 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
15.	Permendagri No 15 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 05 Juli 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
16.	Permendagri No 16 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 05 Juli 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.

17.	Permendagri No 17 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Banggai Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 05 Juli 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
18.	Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 27 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
19.	Permendagri No 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 11 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
20.	Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 08 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
21.	Permendagri No 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 24 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
22.	Permendagri No 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 24 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
23.	Permendagri No 23 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Barat Daya Dan Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 31 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
24.	Permendagri No 30 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Padang Dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.

25.	Permendagri No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
26.	Permendagri No 34 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
27.	Permendagri No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
28.	Permendagri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
29.	Permendagri No 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemerhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
30.	Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.

31.	Permendagri No 39 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
32.	Permendagri No 40 Tahun 2018 tentang atas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
33.	Permendagri No 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
34.	Permendagri No 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
35.	Permendagri No 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
36.	Permendagri No 44 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar Dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
37.	Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
38.	Persyaratan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
39.	Persyaratan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.

40.	Manual Penggunaan Layanan Administrasi	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
41.	Manual Penggunaan Layanan Konsultasi	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
42.	Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Video	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
43.	Surat Edaran tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 29 Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
44.	Form Pengukuran Indeks Profesionalisme PNS	Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 09 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
45.	Surat Edaran Penetapan Jam Kerja PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pada Bulan Ramadhan 1939 H	Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 16 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
46.	Surat Edaran Nomor 800/3310/SJ Tentang Perubahan Atas Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018	Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 28 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
47.	Surat Edaran Nomor 860/3584/SJ Tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018	Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 07 Juni 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.

48.	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
49	Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
50.	Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2015-2019	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
51.	Laporan Keuangan (audited) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017	Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 24 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
51.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
52.	Laporan Barang Milik Negara Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2018	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
53.	Agenda Kementerian Dalam Negeri Semester I	Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
54.	Rekapitulasi Rekomendasi Beasiswa ASN Lingkup Kemendagri Tahun 2017	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
55.	Rekapitulasi Rekomendasi Beasiswa ASN Lingkup Pemda Tahun 2017	Pusat Fasilitas dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
56.	Data Pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017	Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip

57.	Alamat Lengkap Seluruh Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri	Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
58.	Laporan Layanan Informasi Data dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018	Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
59.	Tata Cara Permohonan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
60.	Tata cara pengajuan keberatan informasi di Kementerian Dalam Negeri	Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
61.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
62.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489.05-2039 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal	Jakarta, Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Setiap saat selama digunakan/sebelum ada penggantinya.
63.	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Indonesia - Usia 0 s/d 18 Tahun Semester I Tahun 2018	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
64.	Laporan Bulanan Daerah Perkembangan Perekaman Ktp Elektronik Kabupaten/Kota	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, Maret 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip

65.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.1-866 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, 29 Februari 2016	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
66.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13-112 Dukung Tahun 2017 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, 13 Januari 2017	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
67.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13-257 Dukung Tahun 2018 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, 30 Januari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
68.	Daftar nota Kesepahaman(Mou) Kemendagri dengan Lembaga Pengguna Tentang Pemanfaatannik, Data Kependudukan dan Ktp-EI	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
69.	Perubahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, 15 Desember 2017	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
70.	Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Batam, 7-9 Februari 2018	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Batam, 8 Februari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip

71.	Bahan Sosialisasi Penerapan Kartu Identitas Anak Tahun 2018	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jakarta, 28 Maret 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
72.	<i>Press Realease</i> mengenai Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kewilayahan	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
73.	<i>Press Realease</i> mengenai Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Danau Toba Dalam Bidang Pendidikan Vokasi dan Bidang Transportasi di Provinsi Sumatera Utara	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
74.	<i>Press Realease</i> mengenai Penerapan Kebijakan Publik di Daerah Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
75.	Press Realease mengenai Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
76.	Press Realease mengenai Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Jabatan Fungsional Umum Pol PP	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
77.	Press Realease mengenai Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
78.	Press Realease mengenai Peran Kecamatan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
79.	Press Realease mengenai Percepatan Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
80.	Media BPP Jendela Informasi Kelitbangan Edisi Februari	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jakarta, Februari 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
82.	Media BPP Jendela Informasi Kelitbangan Edisi April	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jakarta, April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip

83.	Media BPP Jendela Informasi Kelitbangan Edisi Juni	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jakarta, Juni 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
84.	Data Realisasi APBD (LRA) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017	Ditjen. Bina Keuangan Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy	Sesuai Retensi Arsip
85.	Daftar Opini BPK terhadap APBD Daerah	Ditjen. Bina Keuangan Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy	Sesuai Retensi Arsip
86.	Data BUMD, BLUD	Ditjen. Bina Keuangan Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy	Sesuai Retensi Arsip
87.	PROFIL Dana Perimbangan dan pinjaman daerah	Ditjen. Bina Keuangan Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy	Sesuai Retensi Arsip
88.	APBD Provinsi, Kabupaten/Kota	Ditjen. Bina Keuangan Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy	Sesuai Retensi Arsip
89.	Daftar pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah	Ditjen. Bina Keuangan Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy	Sesuai Retensi Arsip
90.	Informasi mengenai Isu Strategis UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
91.	Rincian Progress Penyusunan 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
92.	Data Jumlah Daerah Otonom di Indonesia	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
93.	Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Indonesia s.d. 2014	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
94.	Informasi mengenai Arah Kebijakan Pilkada Mewujudkan Pilkada yang Demokratis	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
95.	Informasi Alur Pilkada	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
96.	Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
97.	Daftar Rekapitulasi Pemberian Noreg Raperda Provinsi Tahun 2016	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip

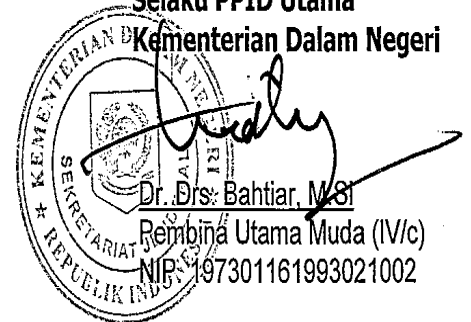
98	Daftar Nama Gubernur dan Wagub seluruh Indonesia	Ditjen. Otonomi Daerah	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
99	Materi Rakornas 2018 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tanggal 13-14 Mei 2018 di Swis Bel Hotel, Jakarta	Ditjen. Bina Pemerintahan Desa	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
100	Surat Edaran Nomor 412.2/5165/SJ Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Ditjen. Bina Pemerintahan Desa	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
101	Surat Pemberitahuan Peneletian Bagi Orang Asing dan Lembaga Asing	Ditjen. Politik dan Pemerintahan Umum	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
102	Rekomendasi Penelitian Dalam Negeri	Ditjen. Politik dan Pemerintahan Umum	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
103	Surat Keterangan Terdaftar Ormas	Ditjen. Politik dan Pemerintahan Umum	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
104	Surat Dukungan Kemendagri dan BNPP Dalam Mcnyemarakkan ASIAN GAMES 2018	Ditjen. Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
105	Contoh Desain PIN Dukungan Asian Games	Ditjen. Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
106	Contoh Desain Baliho Dukungan Asian Games	Ditjen. Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
107	Contoh Desain Topi Dukungan Asian Games	Ditjen. Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
108	Berkas Kelengkapan Hari Anak Terdiri dari Spanduk , Backdrop, Umbul Umbul, Kaos	Ditjen. Bina Pembangunan Daerah	Jakarta, 11 Mei 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
109	Berita tentang Optimalisasi Peran P2UPD Dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat Jenderal	Jakarta, 8 February 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
110	Berita tentang Saatnya Mengevaluasi P2UPD Dengan Pendidikan Diploma-III	Inspektorat Jenderal	Jakarta, 8 February 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip

111	Piagam Pengawasan Internal (AIC)	Inspektoral Jenderal	Jakarta, 31 Juli 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
112	Materi Rakorwasdanas 2018	Inspektoral Jenderal	Jakarta, 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
113	Artikel Mengenai Nahkoda di Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 10 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
114	Artikel Mengenai Pancasila Nafas Bangsa Indonesia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 10 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
115	Program Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar TA 2018	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 9 April 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip
116	Program Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 29 Juni 2018	Hardcopy dan Softcopy	Sesuai Retensi Arsip

KEPALA PUSAT PENERANGAN

Selaku PPID Utama

Kementerian Dalam Negeri



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

Rembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197301161993021002

